

TESIS

SINKRONISASI ATAS INTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA PAILIT KEPADA TENAGA KERJA YANG DIDAHULUKAN TERHADAP TAGIHAN HAK NEGARA (Analisis Putusan MK NO. 67/PUU-XI/2013 terkait Kedudukan Tenaga Kerja dan Pajak Negara Dalam Pembagian Harta Pailit)



Disusun oleh :

ANDRE RIZALDY

NIM :

2310622048

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

TESIS

**SINKRONISASI ATAS INTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA PAILIT KEPADA
TENAGA KERJA YANG DIDAHULUKAN TERHADAP TAGIHAN HAK NEGARA
(Analisis Putusan MK NO. 67/PUU-XI/2013 terkait Kedudukan Tenaga Kerja dan
Pajak Negara Dalam Pembagian Harta Pailit)**



Disusun oleh :

ANDRE RIZALDY

NIM :

2310622048

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

JAKARTA

2025

HALAMAN JUDUL

**SINKRONISASI ATAS INTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA PAILIT
KEPADA TENAGA KERJA YANG DIDAHULUKAN TERHADAP TAGIHAN
HAK NEGARA**

**(Analisis Putusan MK NO. 67/PUU-XI/2013 terkait Kedudukan Tenaga Kerja dan
Pajak Negara Dalam Pembagian Harta Pailit)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister pada
Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

ANDRE RIZALDY

NIM: 2310622048

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**SINKRONISASI ATAS INTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA PAILIT
KEPADA TENAGA KERJA YANG DIDAHULUKAN TERHADAP HAK
NEGARA NEGARA**

**(Analisis Putusan MK NO. 67/PUU-XI/2013 terkait Kedudukan Tenaga Kerja dan
Pajak Negara Dalam Pembagian Harta Pailit)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDRE RIZALDY

NIM: 2310622048

Disetujui untuk Tahap Ujian Tesis

Pada Tanggal 20 Juni 2025

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIK. 216121210

Pembimbing 2



Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp. N., M.Kn.

NIK. 0304036203



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

SINKRONISASI ATAS INTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA PAILIT
KEPADA TENAGA KERJA YANG DIDAHULUKAN TERHADAP HAK
NEGARA NEGARA

(Analisis Putusan MK NO. 67/PUU-XI/2013 terkait Kedudukan Tenaga Kerja dan
Pajak Negara Dalam Pembagian Harta Pailit)

Disusun dan diajukan oleh:

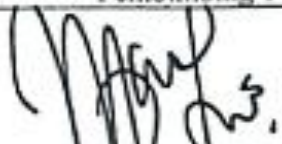
ANDRE RIZALDY

NIM.2310622048

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 20 Juni 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
 <u>Dr. Mutlia Sakti, S.H., M.H.</u> NIK. 21611210	 <u>Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.</u> NIK. 0304036203
Koordinator Program Studi Hukum Program Magister  <u>Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.</u> NIP. 196806081994032001	Dekan Fakultas Hukum  <u>Dr. Satrio, S.H., LL.M.</u> NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Andre Rizaldy

NIM : 2310622048

PROGRAM STUDI : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“SINKRONISASI ATAS INTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA PAILIT KEPADA TENAGA KERJA YANG DIDAHULUKAN TERHADAP PAJAK NEGARA (ANALISIS PUTUSAN MK NO 67/PUU-XI/2013 TERKAIT TENAGA KERJA DAN PAJAK MEGARA DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



ANDRE RIZALDY

NIM 2310622048

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Rizaldy
NIM : 2310622048
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“SINKRONISASI ATAS INTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA PAILIT KEPADA TENAGA KERJA YANG DIDAHULUKAN TERHADAP PAJAK NEGARA (ANALISIS PUTUSAN MK NO 67/PUU-XI/2013 TERKAIT TENAGA KERJA DAN PAJAK MEGARA DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT)”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



ANDRE RIZALDY

NIM. 2310622048

KATA PENGATAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis melakukan penelitian dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Masrizal dan Asmaniar selaku orangtua yang telah melahirkan, membesarkan, serta memberikan kasih sayang kepada penulis hingga saat ini dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Satu dan Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., M.H. selaku Pembimbing Dua yang telah menyediakan waktu, tenaga dan gagasannya untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis.
4. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Magister Hukum sekaligus penguji seminar proposal, Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., dan Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M. yang telah memberikan evaluasi dan masukan untuk melanjutkan penulisan tesis ini.
5. Sivitas Akademika Magister Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa syukur setinggi-tingginya atas seluruh ilmu dan bantuan kepada penulisi selama perkuliahan hingga sampai penulisan tesis ini selesai.

Jakarta, 28 Mei 2025

Penulis

Andre Rizaldy

ABSTRAK

SINKRONISASI ATAS INTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA PAILIT KEPADA TENAGA KERJA YANG DIDAHULUKAN TERHADAP TAGIHAN HAK NEGARA

(Analisis Putusan Mk No. 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Tenaga Kerja dan Pajak Negara Dalam Pembagian Harta Pailit)

Andre Rizaldy, Muthia Sakti, Iwan Erar Joesoef

Pekerja/buruh adalah pihak yang berhak atas harta pailit untuk utang upah pembayarannya dan/atau hak-hak pembayaran mereka atas kontribusi kerja yang telah diberikan pada Perusahaan yang telah dinyatakan pailit seperti yang dinyatakan dalam Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013. Mereka layak untuk didahulukan karena kontribusi yang telah diberikan dan diatur dalam tindak lanjut putusan *a quo* melalui Pasal 95 (4) Undang-Undang tentang Ketenakerjaan sebagaimana yang mendahulukan pelunasan utang upah buruh pekerja dan hak-hak pembayaran lainnya ketika perusahaan pailit dari kreditur lainnya. Namun, terdapat ketentuan Pasal 19 (6) Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Jo. Pasal 21 (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang masih mempertahankan ketentuan mendahulukan hak tagihan utang pajak dari kreditur lainnya. Hal tersebut menciptakan ketidaksinkronan hukum dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan sinkronisasi berkaitan erat dengan kepastian hukum dan keadilan. Keadilan dan kepastian hukum adalah 2 hal berdampingan untuk menciptakan *just law*. Ketika tenaga kerja tidak diberikan rumusan norma yang sinkron, maka hal tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus utang upah dan hak-hak pembayaran buruh/pekerja dikesampingkan. Sinkronisasi antar sesama undang-undang yang tidak sinkron dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 perlu secara vertikal, horizontal, dan fungsional. Sinkronisasi Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 penting dilakukan mengingat pertimbangan dan amar putusannya yang mengubah hierarki hak pendahuluan kreditur dengan lahirnya jenis kreditur baru yaitu kreditur preferen absolut untuk utang upah buruh/pekerja dan kreditur preferen prioritas untuk pembayaran hak-hak buruh/pekerja..

Kata Kunci : Pailit, Tenaga Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi,

ABSTRACT
**LEGAL SYNCHRONIZATION OF BANKRUPTCY ASSET DISTRIBUTION:
PRIORITIZING WORKERS OVER STATE TAXES**

***(An Analysis of the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 Regarding
the Position of Workers and State Taxes in Bankruptcy Asset Distribution)***

Andre Rizaldy, Muthia Sakti, Iwan Erar Joesoef

Workers/laborers are parties who are entitled to bankruptcy property for their wage debts and/or their payment rights for work contributions that have been given to the Company that has been declared bankrupt as stated in the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013. They deserve to be prioritized because of the contributions that have been given and regulated in the follow-up to the decision through Article 95 (4) of the Law on Unemployment as it prioritizes the repayment of debts, labor wages, and other payment rights when the company goes bankrupt from other creditors. However, there are provisions of Article 19 (6) of the Law on Tax Collection by Compulsory Letter Jo. Article 21 (3) of the Law on General Provisions and Tax Procedures which still maintains the provision of prioritizing the right to collect tax debts from other creditors. This creates legal inconsistency and has implications for legal uncertainty. This research uses a normative-juridical research type with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach.

The results of this study show that synchronization is closely related to legal certainty and justice. Justice and legal certainty are 2 things side by side to create *just law*. When labor is not given a synchronous formulation of norms, it results in many cases of wage debt and workers' payment rights being set aside. Synchronization between fellow laws that are not in sync with the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 needs to be vertical, horizontal, and functional. The synchronization of the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 is important considering the considerations and warnings of its decision which changed the hierarchy of creditors' preliminary rights with the birth of a new type of creditor, namely absolute preferred creditors for labor/worker wage debts and priority preferred creditors for the payment of labor/worker rights.

Keywords: Bankruptcy, Workers, Constitutional Court Decision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iiiv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Kerangka Konseptual	25
C. Kerangak Berfikir	28
D. Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Interpretasi Pembagian Harta Pailit terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditor Preferen dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013	37
B. Pengaturan Ideal Terkait Sinkronisasi Pembagian Harta Pailit bagi Kreditor di Indonesia	58
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran dan Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Skema Regulasi Penyelesaian Pailit	51
Gambar 4.2 Alur Pembayaran Pajak pada Pailit	64
Gambar 4.3 Alur Pembayaran Upah Pailit	65